

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa penjajahan Hindia Belanda yang memakan waktu sangat lama, melahirkan beberapa fase penting pada bangsa Indonesia, salah satunya adalah lahirnya masa pergerakan nasional yang merupakan momentum penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Dengan lahirnya pergerakan nasional ini memberikan dampak yang sangat penting yaitu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, yang mana dengan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air ini masyarakat Indonesia menjadi sadar akan usahanya dalam berjuang membebaskan dirinya dari para penjajah.<sup>1</sup> Proses lahirnya pergerakan nasional ini tidak lain diawali dengan para pemuda yang diawali dengan melakukan perlawanan bersifat kedaerahan hingga bersifat nasional.

Lahirnya pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum pemuda ini dipicu oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain karena melihat adanya persamaan dalam penderitaan yang dialami oleh rakyat

---

<sup>1</sup> Christoforus Harun, Hetreda Terry, Aksilas Dasforsate, "Organisasi Pemuda Masa Pergerakan Nasional Indonesia (1908-1928), *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.3, No.2, 2023, p. 459.

Indonesia akibat dari penjajahan bangsa Belanda. Dengan adanya persamaan atas penderitaan yang dialami ini para pemuda akhirnya bergerak untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Sedangkan faktor eksternal yaitu dengan melihat munculnya organisasi nasionalisme di berbagai negara seperti India, China, Filipina, Turki dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong para pemuda untuk membuat sebuah organisasi nasionalisme yang mempunyai tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Puncak dari lahirnya banyak organisasi pergerakan nasional ada pada tahun 1928, pada tahun itu juga terjadinya peristiwa penting yang diinisiasi oleh kaum pemuda yang disebut juga dengan Sumpah Pemuda, pada peristiwa ini merupakan kaum pemuda mengikrarkan sumpah pemuda menjadi satu bangsa yang secara tegas menginginkan kehidupan yang bebas, mandiri, merdeka serta bebas dari penjajahan. Budi Utomo adalah pemicu terbakarnya api pergerakan dan perjuangan nasional sehingga kobaran apinya tersebar sampai seluruh penjuru Nusantara pada saat itu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Christoforus Harun, Hetreda Terry, Aksilas Dasforsate, "Organisasi Pemuda Masa Pergerakan Nasional Indonesia (1908-1928), p. 461.

<sup>3</sup> Muhammad Ichsan, Siti Tiara Maulia, "Budi Utomo: Pemantik Pergerakan Nasional", *Jurnal Edu Sosial*, Vol.3, No.1, 2023, p.98-99.

Lahirnya pergerakan nasional ternyata ada hubungannya dengan kondisi politik yang terjadi pada awal abad ke 20. Sekitar awal abad ke 20 terjadi perkembangan politik yang dilakukan oleh Belanda yang terjadi di Indonesia, yang fokus masalahnya ada pada masalah kemanusiaan dan keuntungan pada sektor ekonomi. Perkembangan politik ini mengarah pada peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Politik baru itu bisa disebut juga sebagai *etische politic* yang berarti politik haluan utama. Perubahan haluan politik yang dilakukan oleh Belanda ini dikarenakan sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status sosial pribumi.<sup>4</sup>

Dengan adanya tuntutan dan kritikan dari berbagai kalangan akhirnya pemerintah kolonial merubah haluan politiknya dan memperbaharui pembaharuan politik yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan pribumi. Pada tanggal 17 September 1901 Ratu Wilhelmina mengemukakan gagasan pembaharuan politiknya dalam pidato kenegaraan yang berjudul *Etische Richting* (Haluan Etika)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Susilo, "Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia", *Jurnal HISTORIA*, Vol.6, No.2, 2018, p.403-404.

<sup>5</sup> Nasiti Muhasabah, Subaryana, YB Jurahman, "Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Hindia Belanda", *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol.2, No.1, 2021, p.13-14.

Dengan perubahan haluan politik yang terjadi di Hindia Belanda menjadi politik etis atau biasa disebut juga dengan politik balas budi menuai banyak sisi positif bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dengan memfokuskan bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia merupakan warisan tak benda dari masa pemerintahan kolonial Belanda yang memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah sebagai bagian dari kebijakan politik balas budi yang terimplementasi. Hal ini terbukti dengan beberapa hasil yang menonjol, seperti peningkatan pendidikan formal, penurunan angka buta huruf, serta meningkatnya jumlah warga pribumi yang terdidik dan mampu bekerja secara profesional untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.<sup>6</sup>

Selain itu, kehadiran sekolah juga memunculkan berbagai organisasi pergerakan nasional, menunjukkan betapa pentingnya peran sekolah dalam proses pembangunan dan perluasan sistem pendidikan di masa Hindia Belanda. dengan demikian munculah para golongan terpelajar yang ingin merubah nasib bangsanya. Keberadaan golongan terpelajar ini mulai melahirkan organisasi-organisasi yang bersifat

---

<sup>6</sup> Shelita Bunga Apriyana, Siti Komariyah, & Yus Novriyanto, "Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol.1, No.1, 2022, p.89

nasionalis, dengan kemunculan Budi Utomo pada tahun 1908 organisasi ini menjadi cikal bakal dari awal pergerakan nasional, karena secara perlahan memicu terbentuknya berbagai organisasi pergerakan lainnya dari yang bersifat radikal sampai bersifat kooperatif.<sup>7</sup>

Setelah politik etis diterapkan banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat Hindia Belanda salah satunya perubahan pada pola pikir. Perubahan pola pikir ini disebabkan oleh masyarakat pribumi yang sudah mulai banyak menempuh pendidikan akibat dari politik etis ini. Dari perubahan itu membuat masyarakat pribumi tersadar serta membangun sifat nasionalis, dengan kondisi tersebut membawa dampak dan pengaruh yang cukup besar dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Rakyat yang ingin suara serta aspirasinya di dengar oleh pemerintah Hindia Belanda akhirnya memberikan beberapa tuntutan dari kampanye-kampanyenya salah satunya adalah pembentukan *Volksraad* atau bisa disebut juga dengan dewan rakyat. Melalui Ratu Wihelmina akhirnya mengabulkan beberapa tuntutan rakyat, salah satunya adalah dengan dibentuknya *Volksraad*.

---

<sup>7</sup> Muhamad Nur Khabib, Ahmad Ruslan, dan Desvian Bandarsyah. "Transformasi Pendidikan dan Perubahan sosial-budaya Pada Masa Pergerekan Nasional." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol. 5, No.2, 2021, p.176.

Dengan terbentuknya *Volksraad* bertujuan untuk memberikan aspirasi politik agar masyarakat dapat menyuarkan keluhan dan pendapatnya terhadap pemerintahan.<sup>8</sup> Abdul Muis merupakan salah satu anggota *Volksraad* yang merupakan perwakilan dari Sarekat Islam. Pada awalnya *Volksraad* didirikan oleh Belanda dengan tujuan untuk menjadi sebuah lembaga yang dapat memberikan saran politik kepada Gubernur Jenderal, yang mana kekuasaan kaum Pribumi dalam *Volksraad* sangatlah terbatas, karena segala putusan akhir masih dipegang oleh pemerintah Belanda. Adanya *Volksraad* ini memicu banyak pendapat pro dan kontra pada beberapa organisasi nasionalis, seperti Indische Partij yang memilih sikap pro terhadap pembentukan *Volksraad* sedangkan *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV) menentang keras pembentukan *Volksraad*.<sup>9</sup>

Begitupun terjadi di dalam tubuh Sarekat Islam terdapat pro dan kontra di dalamnya. Pengurus Central Sarekat Islam seperti Abdul Muis mendukung adanya pembentukan *Volksraad* dengan mempertimbangkan dapat bermanfaat dan mewujudkan tujuan dari Sarekat Islam. Sedangkan Semaun

---

<sup>8</sup> Deni Kurniawan. "Peranan *Volksraad* Dalam Perkembangan Pendidikan Politik Masyarakat Pribumi Di Hindia Belanda Tahun 1916-1942.", 2014, p.37-38.

<sup>9</sup> Azmi, *Abdul Muis*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: 1984), p.48.

dari Sarekat Islam Cabang Semarang menolak dibentuknya *Volksraad*, karena ia menganggap bahwa dengan didirikannya *Volksraad* ini dapat membohongi rakyat bumiputera dan tetap dapat mengeksploitasi kekayaan pada Hindia Belanda. Meskipun terjadi beberapa perdebatan yang berada dalam tubuh Sarekat Islam, Sarekat Islam akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam *Volksraad*.<sup>10</sup>

Gagasan masuknya Sarekat Islam kedalam *Volksraad* ini dinilai sebagai langkah yang tepat. Karena dengan masuknya kedalam *Volksraad* ini mendapatkan kesempatan dalam berpartisipasi untuk memakmurkan rakyat bumiputera melalui pembuatan peraturan yang dilakukan bersama oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai gagasan tersebut, Abdul Muis bersama H.O.S Tjokroaminoto perwakilan dari Sarekat Islam yang terpilih menjadi anggota *Volksraad* akan melakukan negosiasi dan mengadakan kerjasama dengan anggota *Volksraad* lainnya.<sup>11</sup> Hal itu dilakukan agar mempercepat proses tercapainya tujuan Sarekat Islam.

Dalam pembentukan *Volksraad* Abdul Muis dan para tokoh pergerakan lainnya mempunyai peranan penting hingga sampai

---

<sup>10</sup> Maftuhin, Sumarjono, dan Nurul Umamah, "The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945", *Jurnal Historica*, Vol.1, No.2, 2017, p.244-245.

<sup>11</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (LP3ES: 1980), p.130.

*Volksraad* ini benar-benar di resmikan secara langsung oleh Ratu Wihelmina. Awal dimulainya ide pembentukan *Volksraad* ini muncul akibat dari meningkatnya kesadaran politik masyarakat pribumi yang didorong oleh salah satu faktornya itu adalah perkembangan pendidikan dampak dari penerapan politik etis, yang pada akhirnya ide-ide tentang pembentukan *Volksraad* ini mulai di perbincangkan dalam kongres tahunan Sarekat Islam.

Pada tanggal 17-24 Juni 1916, kongres ketiga Sarekat Islam di bawah arahan Central Sarekat Islam yang saat itu Abdul Muis menjabat sebagai wakil ketua CSI<sup>12</sup>. Kongres ini diadakan di Bandung disebut juga sebagai kongres nasional pertama. Pada kongres tersebut, fokus utama Sarekat Islam adalah mendukung pembentukan pemerintahan otonom bagi penduduk Hindia Belanda dalam waktu yang sesingkat mungkin, atau minimal memberikan hak bagi penduduk pribumi untuk menyampaikan pendapat mereka tentang urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas status penduduk Hindia Belanda sebagai warga negara yang memiliki pemerintahan yang independen.<sup>13</sup> Kemudian sebuah telegram dikirimkan atas nama kongres

---

<sup>12</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, p.125.

<sup>13</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusi Pada Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: LP3S: 2017), p.57.



kepada Ratu Belanda dengan harapan pembentukan suatu dewan rakyat ini terealisasi.

Pada tahap ini, perkembangan ideologi Sarekat Islam menunjukkan bahwa kesadaran nasional telah berkembang menjadi kesadaran akan berbangsa. Tuntutan untuk membentuk parlemen yang disuarakan dalam kongres ini bukanlah sekedar omong kosong belaka, namun diiringi dengan upaya nyata. H.O.S Tjokroaminoto sebagai ketua CSI, diberi tugas merancang kerangka pembentukan lembaga perwakilan dan menetapkan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, serta pemerintah di tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan desa<sup>14</sup>

Kongres Nasional Kedua, yang berlangsung pada tanggal 20-27 Oktober 1917 di Batavia, terjadi peralihan menuju arah sosialistik revolusioner. Ketika pecahnya Perang Dunia I (1914-1918), pemerintah kolonial Belanda mulai mengumumkan pembentukan milisia pribumi. Sebagai respons terhadap hal tersebut, beberapa organisasi membentuk sebuah komite yang dikenal sebagai Indie Weerbar pada 31 Agustus 1916. Budi Utomo dan organisasi lainnya menyampaikan mosi pada tahun yang sama, dengan mengusulkan keharusan pembentukan milisia wajib bagi penduduk pribumi, tetapi

---

<sup>14</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusi Pada Nasionalisme Indonesia*, p.54.

dengan syarat bahwa keputusan tersebut harus diputuskan oleh rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan badan perwakilan rakyat dengan kapasitas legislatif dalam mosi tersebut, CSI menyatakan persetujuan penuh terhadap konsep mosi yang diajukan oleh Komite Indie Weebar pada 8 September 1918 di Surabaya. Persetujuan mosi pun menuai kontra, ISDV dengan tegas menentang rencana pertahanan tersebut.<sup>15</sup> Dalam kongres ini tidak hanya memperjuangkan dari gerakan pribumi untuk mengubah nasibnya, tetapi beberapa organisasi memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kemerdekaan.

Pada kongres nasional kedua ini terdapat pidato-pidato penting yang disampaikan oleh H.O.S Tjokroaminoto dan Abdul Muis. Dalam pidatonya H.O.S Tjokroaminoto membahas tentang pemerintahan sendiri, sedangkan Abdul Muis dalam pidatonya membahas tentang nasionalisme. Dalam pidatonya, Abdul Muis menegaskan betapa pentingnya kecintaan akan negara kita dan saudara-saudara sebangsa untuk membebaskan rakyat Indonesia dari para penjajah.<sup>16</sup>

Satu tahun berikutnya, pada tahun 1918 merupakan tahun yang sulit bagi Belanda menghadapi tantangan yang besar. Di

---

<sup>15</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusi Pada Nasionalisme Indonesia*, p.57-58.

<sup>16</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusi Pada Nasionalisme Indonesia*, p.59-61.

Indonesia, gerakan rakyat terus menekankan perlunya perluasan hak-hak rakyat, sementara di Belanda sendiri, kaum sosialis sangat aktif dalam menuntut reformasi demokrasi, baik di dalam negeri maupun di Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Mei 1918, karena tekanan dari berbagai faktor termasuk dampak Perang Dunia I, Belanda memutuskan untuk membentuk dewan penasihat yang disebut *Volksraad*, yang telah dijanjikan sejak bulan Desember 1916.<sup>17</sup> Setelah proses yang panjang, *Volksraad* akhirnya secara resmi didirikan pada tanggal 18 Mei 1928 di Batavia. Namun, *Volksraad* hanya berfungsi sebagai badan penasehat tanpa memiliki kekuasaan legislatif langsung yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Belanda.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Muis untuk melakukan perjuangan itu bisa dilakukan dimana saja termasuk dalam *Volksraad*, walaupun dia yakin dengan masuk ke dalam *Volksraad* saja tidak cukup untuk mencapai tujuan secara maksimal. Tetapi dengan adanya *Volksraad* ini dapat bersuara di dalam forum walaupun tidak di dengar oleh penguasa tapi menurut Muis ini lebih efektif dibandingkan dengan menyuarakan aspirasi dengan cara

---

<sup>17</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusi Pada Nasionalisme Indonesia*, p.61.

<sup>18</sup> Rasyid, Soraya dan Tamara, Anisa, Sarekat Islam Penggagas Nasionalisme Di Indonesia. *Jurnal Rihlah* Vol 8 No 1 Januari-Juni (2020), p.77.

berkeliling dengan melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintah dihadapan rakyat.<sup>19</sup>

Dalam laporan *Volksraad* dituliskan bahwa Abdul Muis yang berstatuskan sebagai anggota *Volksraad* mewakili golongan wartawan untuk periode 1918-1921. Dalam periode ini Muis memanfaatkan waktu ini untuk mengemukakan tuntutan dari organisasinya yaitu Sarikat Islam. Sebagai anggota *Volksraad* yang mewakili golongan wartawan, muis juga mengusulkan agar *Volksraad* ini mempunyai organisasi tersendiri dalam bidang jurnalistik, khususnya pada bidang penulisan berita apa yang terjadi di dalam *Volksraad*. Dengan dibuatnya organisasi ini bermanfaat untuk mencegah kesimpang siuran pemberitaan yang terjadi di dalam *Volksraad*.<sup>20</sup> Dalam perjuangannya Abdul Muis di *Volksraad* amatlah gigih, ia menuntut dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu gagasannya adalah dengan dihapuskannya kerja rodi yang dinilai memberatkan rakyat.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan mengenai kiprah Abdul Muis dalam *Volksraad* ini akan menjadi menarik jika kita mengetahui cara berpolitik Abdul Muis dan kondisi sosial politik pada tahun tersebut. Jika dilihat dengan politikus di zamannya Abdul Muis

---

<sup>19</sup> Azmi, *Abdul Muis*, p.49.

<sup>20</sup> Azmi, *Abdul Muis*, p.49-50.

<sup>21</sup> Mirza Nur B., *Abdul Moeis: Politikus, Jurnalis, Sastrawan*, (Jakarta: Mutiara, 1980), p.38.

ini berbeda dengan politikus yang lainnya, karena pada zaman tersebut karakter politiknya masih bersifat radikal, sedangkan karakter politik yang digunakan oleh Abdul Muis ini bersifat kooperatif. Dalam hal inilah penulis tertarik untuk membahas kiprah politik Abdul Muis dalam *Volksraad* tahun 1916-1921.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang penulisan skripsi yang telah dipaparkan di atas, penulis telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan penulisan ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Biografi Abdul Muis?
2. Bagaimana Kebijakan Politik Pemerintah Hindia Belanda Awal Abad 20?
3. Bagaimana Kontribusi Abdul Muis dalam *Volksraad* pada tahun 1916-1921?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan penelitian dapat diambil sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui biografi Abdul Muis
2. Untuk mengetahui kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang terjadi pada awal abad ke 20
3. Untuk mengetahui kontribusi Abdul Muis dalam *Volksraad* pada tahun 1916-1921

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian mengenai Kiprah Abdul Muis dalam *Volksraad* Tahun 1916-1921 M, penulis melakukan kajian terlebih dahulu mulai dari buku, surat kabar, skripsi, tesis, jurnal dan sumber lainnya, guna mencari referensi dalam penelitian serupa agar bahasan yang diteliti bisa dibahas secara maksimal dan sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan.

Kajian pustaka ini penting untuk dilakukan sebagai salah satu sarana langkah menghindari terjadinya pengulangan terhadap penelitian serupa. Berikut merupakan literatur yang dijadikan sebagai kajian pustaka:

1. Skripsi Mohammad Sa'roni dengan judul "*Abdul Muis: studi tentang peranan dalam perkembangan Serikat Islam Tahun 1912-1922*". Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Sunan Ampel Surabaya, tahun terbit 1995.

Skripsi Mohammad Sa'roni dengan judul "*Abdul Muis: Studi tentang Peranan dalam Perkembangan Serikat Islam Tahun 1912–1922*" mengkaji peran Abdul Muis dalam proses perkembangan organisasi Serikat Islam, terutama

dalam memperkuat struktur dan pengaruhnya sebagai kekuatan politik nasional. Penelitian ini menyoroti kontribusi Abdul Muis dalam konsolidasi ideologi dan kepemimpinan organisasi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penulis menitikberatkan pada kiprah Abdul Muis dalam Volksraad tahun 1916–1921, khususnya sebagai bentuk perjuangan politik formal dalam lembaga legislatif kolonial.

2. Skripsi Mogja Wiguna Julian dengan judul “*Kiprah Abdul Muis dalam Sarekat Islam (SI) Tahun 1912–1927*”. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun terbit 2017.

Skripsi Mogja Wiguna Julian dengan judul “*Kiprah Abdul Muis dalam Sarekat Islam (SI) Tahun 1912–1927*” membahas aktivitas politik Abdul Muis dalam tubuh Sarekat Islam sebagai organisasi massa terbesar pada masa pergerakan nasional. Dalam penelitiannya, Mogja memaparkan peran Abdul Muis dalam menyuarakan aspirasi rakyat melalui organisasi tersebut, termasuk posisinya sebagai Wakil Ketua Central Sarekat Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian yang

penulis lakukan ialah penulis lebih memfokuskan pembahasan pada kiprah Abdul Muis dalam lembaga Volksraad tahun 1916–1921 sebagai bentuk perjuangan politik kooperatif dalam ruang resmi pemerintahan kolonial.

3. Buku karya Mirza Nur B. yang berjudul *Abdul Moeis; Politikus, Jurnalis, Sastrawan*, 1980. Menjelaskan tentang biografi Abdul Muis mulai dari dia masih kecil hingga akhirnya ia terjun pada dunia jurnalistik sampai memasuki duni politik. Juga menceritakan penderitaan Abdul Muis saat ia diasingkan oleh Belanda, kemudian membahas perubahan haluan politiknya menjadi seorang sastrawan dan juga akhir hayat Abdul Muis. Pada buku ini terdapat persamaan pembahasan yaitu pada pembahsan biografi Abdul Muis dan juga politik Abdul Muis. Pembeda dari buku ini dengan penulisan ini ada pada pembatasan subjeknya yang berfokus pada biografi dan politik Abdul Muis.
4. Buku karya Drs. Azmi yang berjudul *Abdul Muis*, 1984. Menjelaskan tentang perjalanan Abdul Muis, mulai dari masa kecil awal mulai ia merantau ke tanah Jawa hingga menjadi jurnalis yang merupakan awal karir Abdul Muis terjun kedalam



politik Indonesia. Dalam buku ini juga banyak petikan-petikan gagasan politik yang Abdul Muis lontarkan di beberapa organisasi politik. Hal ini menjadi persamaan dengan apa yang akan penulis angkat yaitu mengetahui bentuk gerakan politik yang dilakukan oleh Abdul Muis dan yang menjadi pembeda antara penulisan ini dengan penulisan yang akan ditulis adalah membatasi subjek penulisannya yang hanya berfokus pada biografi dan gagasan politik Abdul Muis, sedangkan dalam buku ini juga menuliskan perubahan haluan Abdul Muis dari politik menjadi sastrawan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Kiprah mempunyai arti yaitu melakukan kegiatan dengan semangat tinggi dalam bidang.<sup>22</sup> Kiprah juga tidak bisa lepas dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Kiprah sering diucapkan ketika kita menyebutkan seseorang yang mempunyai pengaruh penting. Tindakan

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet ke-8, p. 17

seperti inilah yang diperankan oleh Abdul Muis, karena beliau mempunyai pengaruh dalam politik Indonesia.

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari Bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam ber negara di zaman Yunani, orang-orang saling berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Secara sederhananya politik yang berkembang di Yunani bisa ditafsirkan sebagai suatu interaksi antara satu individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Seiring berkembangnya zaman para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga memperkaya arti dari kata politik itu sendiri. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan mengatur pembuatan keputusan publik dalam suatu masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan lainnya seperti Andrey Heywood, menurutnya politik adalah suatu kegiatan suatu bangsa yang mempunyai tujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya serta tidak terlepas dari gejala

konflik dan kerjasama.<sup>23</sup> Secara sederhananya politik merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang dibuat dan digunakan oleh suatu masyarakat pada wilayah tertentu untuk menegakkan peraturan yang sudah dibuat pada masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, politik Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya. Pelaksanaan ini tidak lepas dari tiga pembagian kekuasaan atau bisa disebut juga dengan trias politica (leglistatif, eksekutif, dan yudikatif).<sup>24</sup>

Pada penelitian ini digunakan beberapa teori untuk memahami sosok tokoh yang menjadi fokus kajian. Pertama, teori yang bertujuan untuk mengetahui berbagai hal terkait seorang tokoh, seperti riwayat pendidikan, gagasan, dan karya-karyanya. Teori ini dapat disebut sebagai teori biografi, karena melalui biografi kita dapat menelusuri kehidupan seorang tokoh, baik perilakunya maupun pengaruh gagasannya sepanjang hidupnya. Dengan teori ini, penulis mengupas biografi Abdul Muis mulai dari latar belakang keluarganya, riwayat pendidikannya, hingga gagasan dan karya-karyanya.

---

<sup>23</sup> Muhammad Muthahari, Ramdhani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung 2022), p. 2.

<sup>24</sup> Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, No.2, 2018, p.247.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Wilhelm Dilthey, karena dalam teorinya menekankan pentingnya memahami sejarah dan tindakan manusia melalui pengalaman hidup secara utuh, sehingga kehidupan tokoh sejarah perlu diungkapkan untuk memahami kepribadian tokoh tersebut.<sup>25</sup> Pandangan ini menjadikannya salah satu pelopor pendekatan biografis dalam ilmu humaniora

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan Teori Orang Besar (Great Man Theory) yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle (1841), yang berpendapat bahwa sejarah dunia pada hakikatnya adalah biografi dari orang-orang besar.<sup>26</sup> Teori ini menekankan peran tokoh dengan kapasitas luar biasa, seperti visi, keberanian, dan kemampuan kepemimpinan, sebagai penggerak utama perubahan sejarah. Meskipun mendapat kritik karena cenderung mengabaikan faktor struktural, teori ini relevan untuk memahami kiprah Abdul Muis di Volksraad, di mana kapasitas pribadinya sebagai jurnalis, orator, dan tokoh pergerakan nasional memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan wacana politik kolonial.

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Waca Yogya, 2003), p.209.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), p, 264 268.

Selanjutnya digunakan teori behavior, yaitu aliran dalam psikologi yang menganggap bahwa tingkah laku merupakan faktor utama dalam menggambarkan kepribadian seseorang.<sup>27</sup> Penggunaan teori ini memfokuskan perhatian pada tindakan politik seorang tokoh yang menonjol dan sejauh mana hal tersebut memengaruhi perilaku politiknya. Dengan teori ini, penulis dapat menganalisis perilaku politik Abdul Muis baik dalam kebermasyarakatannya maupun dalam kiprahnya di dunia politik kolonial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis mengenai perilaku politik sebagai bagian dari awal munculnya gerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Tindakan politik di sini dilihat sebagai bagian dari pemikiran dasar kaum behavioris, yang beranggapan bahwa kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari tindakan politik yang menyertainya.<sup>28</sup>

Pendekatan keperilakuan (*behavioral approach*) dalam ilmu politik menekankan analisis terhadap pernyataan, sikap, dan perilaku nyata dari individu, organisasi, maupun lembaga politik. Morton R. Davis menjelaskan bahwa

---

<sup>27</sup> Suhermanto Ja'far. "Struktur Kepribadian Manusia Perspektif Psikologi Filsafat." *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol.2, No.2 2015, p. 209.

<sup>28</sup> S. P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), p.99.

pendekatan ini berkembang sejajar dengan pendekatan fungsional-struktural dan analisis sistem, meskipun memiliki fokus dan metode tersendiri.<sup>29</sup> Sejalan dengan itu, David Easton (1953) memandang pendekatan berperilaku sebagai bagian dari upaya memahami dinamika sistem politik melalui perilaku aktor-aktor politik sebagai unit analisis utamanya. Dengan memadukan teori behavior dan pendekatan berperilaku, penelitian ini dapat melihat secara utuh keterkaitan antara kepribadian, tindakan politik, dan pengaruhnya terhadap peran Abdul Muis dalam perkembangan awal gerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20.

Dalam berpolitik Abdul Muis banyak memainkan perannya pada dunia *pers*, yang mana pers ini merupakan sebuah lembaga sosial dan komunikasi massa yang bergerak pada bidang jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar dengan menggunakan media cetak, media elektronik maupun segala jenis saluran yang tersedia.<sup>30</sup> Dalam masa kemerdekaan pers memiliki peran penting dalam mendorong

---

<sup>29</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p.75

<sup>30</sup> Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010), p.1.

dan memperkuat rasa nasionalisme di Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui pers ini digunakan sebagai sebuah wadah yang ampuh untuk menyampaikan kekuatan untuk melawan penjajah. Dalam undang-undang No.40 Tahun 1999 Pasal 33 disebutkan fungsi pers antara lain adalah sebagai wahana komunikasi massa, sebagai penyebar informasi, sebagai pembentuk opini, dan sebagai media informasi.<sup>31</sup>

Selain aktif pada dunia pers, Abdul Muis juga aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Bagi Abdul Muis Sarekat Islam lah yang paling cocok dengan latar belakang pribadinya. Menurut Abdul Muis Sarekat Islam lebih berkenan dengan corak ke Islamannya yang merupakan gerakan massa rakyat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi maupun beragama.<sup>32</sup> Bersama Sarekat Islam, Abdul Muis melanjutkan karir politiknya menjadi anggota *Volksraad* pada tahun 1918-1921. *Volksraad* merupakan sebuah lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat Hindia Belanda.<sup>33</sup> Dalam *Volksraad*, Abdul Muis dengan gigih memperjuangkan kepentingan rakyat yaitu salah

---

<sup>31</sup> Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, p.4-5.

<sup>32</sup> Azmi, *Abdul Muis*, p.18.

<sup>33</sup> Deni Kurniawan. "Peranan Volksraad Dalam Perkembangan Pendidikan Politik Masyarakat Pribumi Di Hindia Belanda Tahun 1916-1942.", 2014, p.70.

satunya adalah dihapuskannya kerja rodi yang sangat memberatkan rakyat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga dapat menjawab atas pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode Penelitian Sejarah, karena objek yang akan diteliti adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yaitu pada tahun 1916-1921. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis menurut metode pendekatan sejarah yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah* meliputi lima tahapan yang diantaranya:

### **1) Pemilihan Topik**

Menurut Kuntowijoyo pemilihan topik menjadi urutan pertama dalam penelitian sejarah dikarenakan topik yang akan dijadikan objek untuk diteliti dalam bidang kesejarahan itu cukup banyak sehingga penting bagi sejarawan untuk menentukan topik bahasan terlebih

---

<sup>34</sup> Kuntowijoyo, *Ilmu Pengantar Sejarah*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2018), p. 91.



dahulu. Pada saat melakukan pemilihan topik dipilih berdasarkan pendekatan emosional dan pendekatan intelektual, karena kedua hal tersebut merupakan akan memicu ke subjektifan dan ke objektifan dari sebuah penelitian. Berdasarkan pendekatan emosional atau ketertarikan pribadi penulis terhadap topik penulisan yang akan diangkat diantaranya karena merasa tertarik dengan tokoh politik Abdul Muis, karena cara berpolitik Abdul Muis berbeda dengan tokoh politik se zamannya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat tokoh tersebut dalam topik penulisan. Sedangkan berdasarkan pendekatan intelektual atau pengetahuan yang berarti keilmuan penulis yang diangkat menjadi topik penulisan linear dengan mata kuliah yang telah penulis ampu yaitu mata kuliah sejarah pergerakan nasional Indonesia pada jenjang bangku perkuliahan semester VI. Penulis pernah belajar tentang pergerakan nasional yang berlangsung di Indonesia mulai dari awal kebangkitan pergerakan nasional dipelopori oleh Budi Utomo kemudian berlanjut pada Sarekat Islam hingga masa menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga dengan pembelajaran tersebut memicu penulis untuk mengangkat topik penulisan dan berharap bisa mempermudah dalam penulisan ini.

## 2) Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.<sup>35</sup> Heuristik ini merupakan teknik atau cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan, dan melalui interview. Saat ini data sejarah bisa didapatkan dari berbagai macam cara selain studi pustaka, sumber sejarah dapat juga diakses melalui media cetak dan elektronik.<sup>36</sup>

Dalam tahapan ini penulis mencari serta mengumpulkan sumber dengan memanfaatkan secara maksimal media elektronik yaitu dengan cara mengakses perpustakaan digital PERPUSNAS, website Repository, Google Cendikia dan media lainnya. Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sesuai dengan apa yang akan diteliti. Adapun beberapa sumber pada penulisan ini antara lain adalah:

Pertama, buku Abdul Muis karya Drs. Azmi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (1984), yang

---

<sup>35</sup> Saefur Rochmat. *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), p. 153.

<sup>36</sup> Muhamad Nandang Sunandar. *Pengantar Historiografi*, (Serang, Banten: Media Madani, 2021), p.62.

menyajikan informasi biografis dan kiprah Abdul Muis dalam bidang politik, jurnalistik, dan pergerakan nasional. Kedua, buku Abdul Moeis karya Mirza Nur B. (1980) yang diterbitkan oleh Penerbit Mutiara Jakarta, yang memuat gambaran menyeluruh tentang perjalanan hidup Abdul Muis, mulai dari masa muda, karier jurnalistik, hingga aktivitasnya dalam organisasi Sarekat Islam.

Ketiga, buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan (1997) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, digunakan untuk memperkuat konteks historis pergerakan nasional sebagai latar dari keterlibatan Abdul Muis dalam Volksraad. Keempat, buku Gerakan Sarekat Islam: Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia karya Anton Timur Djaelani (2017) yang diterbitkan oleh LP3ES, memberikan analisis tentang kontribusi Sarekat Islam dalam perjuangan nasional serta peran tokoh-tokohnya, termasuk Abdul Muis.

Kelima, buku Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900–1942 karya Deliar Noer (1980) yang juga diterbitkan oleh LP3ES, menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika politik dan ideologi Sarekat Islam dalam spektrum gerakan Islam modernis di Indonesia, yang tidak

dapat dilepaskan dari peran Abdul Muis sebagai salah satu tokohnya.

Seluruh sumber tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan kerangka historis dan analisis terhadap tokoh yang diteliti, serta memperkuat validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3) Verifikasi

Tahapan selanjutnya setelah melakukan kritik yaitu melakukan verifikasi atau kritik sumber, pada tahapan ini langkah yang dilakukan bertujuan untuk menentukan otentikasi dan kredibilitas atas sumber yang didapatkan. Tahapan ini merupakan usaha untuk menganalisa, memisahkan dan mencari suatu sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang relevan dengan penelitian.<sup>37</sup> Pada tahapan inipun perlu adanya penyeleksian dan pengujian data baik secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah, sedangkan kritik intern dilakukan untuk meneliti kredibilitas isi sumber.<sup>38</sup> Kritik intern penulis lakukan dengan menyeleksi bukti-bukti dan informasi-informasi yang mendukung penelitian, sehingga setelah diseleksi

---

<sup>37</sup> Muhamad Nandang Sunandar. *Pengantar Historiografi*, p. 65.

<sup>38</sup> Ilham Prasetyo. *Peran KH. Tb. Ahmad Hasuri Tohir dalam Pengembangan Sosial Keagamaan di Kaloran Serang 1978-2018*. Diss. UIN SMH BANTEN, 2020, p. 21.

penulis dapat mengkategorikan mana yang menjadi data sumber primer dan data yang menjadi sumber sekunder, sedangkan melalui kritik ekstern, penulis menganalisis sumber data yang terkumpul apakah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.

#### 4) Interpretasi

Secara harfiah, interpretasi berarti pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Kata yang dapat menjadi padanan untuk interpretasi yaitu penafsiran. Jika dilihat dari definisi diatas, suatu objek yang telah jelas maknanya, maka objek tersebut tidak mengundang interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasil dari proses penafsiran.<sup>39</sup>

Setelah melakukan tahapan verifikasi maka penulis melakukan tahapan interpretasi yaitu suatu tahapan penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain.<sup>40</sup> Semua fakta sejarah yang terkumpul perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran, karena umumnya fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul belum mampu mendeskripsikan peristiwa yang

---

<sup>39</sup>Ikrimiyah Laily Harun, *Subjektivitas dalam Interpretasi Sejarah*. Diakses dari <http://historyofikrie.blogspot.com/2013/05/subjektivitas-dalam-interpretasisejarah.html?m=1> pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.45 WIB.

<sup>40</sup> Muhamad Nandang Sunandar. *Pengantar Historiografi*, p. 67.

bersangkutan secara komprehensif. Oleh karena itu, Fakta-fakta sejarah yang ada harus diinterpretasi, disusun, serta digabungkan agar terbentuk cerita sejarah.

Interpretasi atau penafsiran bersifat individual sehingga sering kali subjektif. Hal itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang penulis sejarah itu sendiri. Terdapat latar belakang motivasi, emosi, pola pikir, dan lain sebagainya yang mempengaruhi penulis.<sup>41</sup> Pada tahap ini penulis melakukan interpretasi atau penafsiran pada fakta-fakta sejarah yang ada dengan cara memahaminya terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

#### 5) Historiografi

Historiografi berasal dari bahasa yunani, yaitu historia dan grafien. Historia berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan grafien berarti gambaran. Secara harfiah historiografi adalah sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam. Historiografi adalah tahapan akhir di dalam penelitian sejarah. Pada tahapan ini penulis memaparkan dan menguraikan gambaran tentang sejarah yang telah di proses melalui tahapan sebelumnya. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, penulis berusaha

---

<sup>41</sup> Kuntowijoyo, *Ilmu Pengantar Sejarah*, p. 225.

mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisanya agar dapat dipahami bagi pembaca.<sup>42</sup>

Sejarah bukanlah semata-mata rangkaian fakta saja, namun sejarah merupakan sebuah cerita. Cerita yang dimaksud ialah penghubungan antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa dan suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau pemberian tafsiran/interpretasi kepada kejadian tersebut. Dengan kata lain penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulis sejarah dalam masanya. Secara umum, dalam metode sejarah, penulisan sejarah (historiografi) merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.<sup>43</sup>

Dalam tahap terakhir ini, yakni tahap historiografi, penulis menyajikan hasil penelitian yang ditulis dalam tiga poin besar, yakni Pengantar, Hasil Penelitian dan Kesimpulan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam pembahasan penelitian ini penulis membaginya kedalam lima bab masing-masing memiliki beberapa sub bab yang

---

<sup>42</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), p. 147.

<sup>43</sup> Kuntowijoyo, *Ilmu Pengantar Sejarah*, p.231.

merupakan penjelasan dari bab tersebut. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Uraian dalam bab ini merupakan penjelasan pokok mengenai apa yang menjadi bahasan bab-bab selanjutnya dan mencerminkan kerangka berpikir penelitian.

**BAB II:** Biografi Abdul Muis, yang mencakup; asal-usul keluarga Abdul Muis, serta pendidikan Abdul Muis, dan perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia.

**BAB III:** Kebijakan Politik Pemerintah Hindia Belanda Awal Abad Ke-20, meliputi kebijakan politik etis, kebijakan politik asosiasi pendidikan, kebijakan desentralisasi, pembentukan *Volksraad*, dan respon organisasi pergerakan terhadap pembentukan *Volksraad*.

**BAB IV:** Kiprah Abdul Muis dalam *Volksraad* pada tahun 1916-1921 M, meliputi kiprahnya dalam, *Volksraad*, dan peran terhadap pergerakan nasional Indonesia.



**BAB V:** Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran dari penjelasan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Jelasnya dengan penelitian yang telah dilakukan dan didukung dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis. Serta harapan dari penulis agar kajian ini dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya guna memperkaya keilmuan dibidang Sejarah Peradaban Islam.